

## Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha di Daerah Penyangga Taman Nasional Laut Bunaken Provinsi Sulawesi Utara

Very Y. Londa

Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Universitas Sam Ratulangi; Manado  
[verylonda@unsrat.ac.id](mailto:verylonda@unsrat.ac.id)

**ABSTRACT.** *People take advantage of the potential and position of Bunaken Marine National Park to support their survival through business activities. This research was conducted to find a model in developing the community capacity of business actors in the buffer zone of Bunaken Marine National Park. This study used a qualitative design, data obtained through interviews, observation and secondary data collection. The findings of this study are that the building of community capacity of business actors in the buffer areas of Bunaken Marine National Park, North Sulawesi Province is more carried out in program implementation through training activities to strengthen knowledge and skills. Strengthening capacity has not been able to provide the right motivation and assistance for business actors. The concept that can be put forward as the findings of this study is that the development of community capacity in business actors is related to aspects of human resources and institutions. Development of human resource capacity through the dimensions of training for knowledge and skills as well as assistance to motivate and control business development. Capacity building in business institutions is related to strengthening business capital, business facilities and business management.*

*Keywords: Capacity Building, Business Actors, Human Resources, Institutional.*

**ABSTRAK.** Masyarakat memanfaatkan potensi dan posisi Taman Nasional Laut Bunaken untuk menunjang keberlangsungan hidup melalui aktivitas usaha. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan model dalam pengembangan kemampuan masyarakat pelaku usaha di daerah penyangga Taman Nasional Laut Bunaken. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan pengumpulan data sekunder. Temuan penelitian ini bahwa pengembangan kapasitas masyarakat pelaku usaha di daerah penyangga Taman Nasional Laut Bunaken Provinsi Sulawesi Utara lebih dilakukan pada pelaksanaan program melalui kegiatan pelatihan untuk penguatan pengetahuan dan keterampilan. Penguatan kapasitas belum mampu memberikan motivasi dan pendampingan yang tepat bagi pelaku usaha. Konsep yang dapat dikemukakan sebagai temuan penelitian ini bahwa pengembangan kapasitas masyarakat pelaku usaha berkaitan dengan aspek sumber daya manusia dan kelembagaan. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui dimensi pelatihan untuk pengetahuan dan keterampilan serta pendampingan untuk memotivasi maupun mengontrol perkembangan usaha. Pengembangan kapasitas secara kelembagaan usaha berkaitan dengan penguatan modal usaha, sarana usaha dan manajemen pengelolaan usaha.

**Kata Kunci:** Pengembangan Kapasitas, Pelaku Usaha, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan.

### PENDAHULUAN

Indonesia yang adalah negara bahari kaya akan kekayaan laut yang dapat menunjang perekonomian negara, daerah dan masyarakat itu sendiri. Salah satu kekayaan laut adalah Taman Nasional Laut Bunaken yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Taman Nasional Bunaken ini memiliki keindahan bawah laut seperti terumbu karang dan ekosistem laut lainnya yang berbeda dengan taman laut lainnya. Memperhatikan potensi ini maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadikan Taman Nasional Bunaken sebagai salah satu objek wisata andalan dalam menunjang perekonomian daerah.

Letak Taman Nasional Laut Bunaken secara geografis terbagi menjadi 2 wilayah yaitu bagian utara dan selatan. Bagian Utara terdiri dari 5 pulau (Bunaken, Manado Tua, Siladen, Mantehage, dan Nain) dan pesisir antara desa Molas sampai Tiwoho yang disebut pesisir Molas – Wori dengan luas 75.265 ha. Bagian selatan terletak antara pesisir desa Poopoh sampai desa Popareng yang disebut pesisir Arakan-Wawontulap dengan luas 13.800 ha. Meliputi 24 desa dengan + 30.000 penduduk dalam 1 wilayah kota dan 3 kabupaten (Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, dan Minahasa Utara) (<http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/>).

Berkembangnya pengelolaan objek wisata seperti halnya Taman Nasional Bunaken memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat (Yachya, Wilopo dan Mawardi, 2016) dengan berkembangnya usaha masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok di sekitar kawasan. Penduduk yang ada sebagian besar menggantungkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup pada sumber daya alam dan pemanfaatan objek wisata melalui pengelolaan usaha di sekitar kawasan. Pengelolaan usaha yang memanfaatkan objek wisata merupakan hal yang baik dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari. Pengelolaan usaha oleh masyarakat sekitar kawasan juga menghindari semakin rusaknya sumber daya alam taman nasional oleh karena adanya penebangan bakau yang berlebihan, penangkapan ikan dengan cara merusak, pembukaan hutan untuk perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi dicermati dari aspek lingkungan dan pelestarian alam taman laut maka berkembangnya usaha masyarakat jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam rusaknya ekosistem laut seperti bertambahnya sampah hasil usaha maupun adanya limbah yang dihasilkan dari usaha. Juga terdapat sekitar 30 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan tangkap di Kota Manado yang termasuk didalamnya berada di kawasan Taman Nasional Laut Bunaken yang merupakan peserta program pengembangan usaha mina pedesaan perikanan tangkap belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan dalam hal penguatan ekonomi masyarakat (Mamentu, 2015).

Permasalahan yang dikemukakan diatas memerlukan penanganan yang serius dari semua pihak. Hal ini menjadi penting agar kehadiran objek wisata selain dapat meningkatkan usaha masyarakat akan tetapi juga dapat memperhatikan keberlangsungan kondisi dan ekosistem alam. Sebab kemampuan manusia sebagai pelaku usaha dan potensi sumber daya alam merupakan hal yang penting sebagaimana model pembangunan yang berdasarkan pengembangan masyarakat (Puspitasari dkk, 2019). Sekalipun memang harus diakui bahwa telah terdapat berbagai program pengembangan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan usaha maupun dalam pelestarian alam telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk juga didalamnya terdapat beberapa desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Ekowisata seperti Desa Popareng Kecamatan Tatapaan, Desa Poopo Kecamatan Tombariri dan Desa Bahoy Kecamatan Likupang Barat.

Masyarakat yang ada di daerah kawasan Taman Nasional Laut Bunaken berdasarkan fakta lapangan merupakan pelaku usaha melalui usaha ikan kering, usaha kue tradisional, usaha souvenir, usaha rumput

laut, usaha pemandu penyelaman, homestay dan usaha lainnya. Akan tetapi dalam pengelolaan usahanya masih juga diperhadapkan dengan kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pengembangan usaha, permodalan, pemasaran, ekonomi kreatif. Demikian pula halnya dengan belum optimalnya sinergitas program pemberdayaan dalam satu program terpadu, minimnya data dan informasi di lapangan terkait potensi yang dikembangkan masyarakat (<http://ksdae.menlhk.go.id/>) yang masih dihadapi oleh masyarakat pelaku usaha maupun pemerintah sampai dengan saat ini.

Taman Nasional Laut Bunaken yang memiliki potensi pariwisata yang baik serta kaya akan berbagai jenis ikan seharusnya dapat juga menjadikan masyarakat pelaku usaha turut menikmati baik secara langsung maupun tidak langsung guna keberlangsungan hidup. Pengembangan usaha yang berbarengan dengan pariwisata berdampak secara ekonomi dalam hal pendapatan daerah/negara (devisa), pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, harga, distribusi manfaat/keuntungan, kepemilikan, pembangunan. Olehnya strategi pengembangan usaha dalam kaitannya dengan pariwisata pada modal, pasar, kelembagaan dan kewirausahaan (Gunawan, dkk, 2016).

Masyarakat diharapkan dapat menjadi pelaku usaha di daerah penyangga dan juga mampu mengelola potensi laut yang ada secara arif dan bijak. Menjadikan masyarakat memiliki potensi yang baik sebagai pelaku usaha dan menjadi masyarakat yang dapat menjaga kelestarian alam Taman Nasional Laut Bunaken maka harus dikembangkan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki. Hal ini penting agar masyarakat tidak menjadi tamu di tempat sendiri, akan tetapi berperan aktif dalam menjaga kelestarian ekosistem alam laut taman nasional. Olehnya penelitian ini dilakukan untuk menemukan model yang tepat bagi pengembangan kemampuan masyarakat pelaku usaha di daerah penyangga Taman Nasional Laut Bunaken. Temuan penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan rekomendasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.

## TELAAH PUSTAKA

Upaya penyelesaian masalah dalam pengelolaan usaha di kawasan konservasi alam yang juga sebagai tempat wisata seperti Taman Nasional Laut Bunaken haruslah memerlukan landasan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas masyarakat dan pengembangan usaha

masyarakat. Disamping itu juga perlu memperhatikan konsep pariwisata.

Berkaitan dengan pengembangan kemampuan atau kapasitas disuatu komunitas masyarakat perlu memperhatikan kondisi lokal seperti budaya, geografi, sosial, politik, dan potensi daerah guna pengambilan langkah yang tepat agar tidak mengalami kegagalan dalam penerapannya. Sebab peningkatan kapasitas secara organisasi merupakan usaha meningkatkan peran dan mengembangkan tata kelola sehingga setiap potensi yang dimiliki dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan, meliputi pengembangan sumber daya fisik, pengembangan proses operasional dan pengembangan sumber daya manusia (Alam & Prawitno, 2015). Pengembangan kapasitas dalam masyarakat secara umum akan juga bersentuhan dengan berbagai kepentingan yang ada, kelompok organisasi lokal masyarakat serta juga dalam kaitannya dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.

Langkah yang dianggap perlu dilakukan yaitu pada sumber daya masyarakat pelaku usaha di objek wisata tersebut. Sumberdaya manusia selaku pelaku usaha merupakan semua orang yang berkecimpung dan atau menyumbang tenaga dan pikirannya pada seluruh potensi yang terkandung di dalam usaha demi tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan (Sunaryo, 2013:201). Sehingga jika dikaitkan dengan pelaku usaha di sektor pariwisata seperti halnya dalam kawasan Taman Nasional Laut Bunaken maka sumber daya pariwisata dapat digolongkan berdasarkan institusinya yaitu institusi pemerintah, institusi swasta dan masyarakat. Model pengembangan dan pengelolaan usaha masyarakat yang berkaitan dengan sektor pariwisata haruslah melibatkan masyarakat setempat melalui pola pemberdayaan. Ini dilakukan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri, dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (Sunaryo, 2013; Yachya dkk, 2016). Sehingga ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia dapat meliputi pelatihan, *training skill*, dan sertifikasi (Yachya dkk, 2016).

Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan pengelola usaha antara lain : kurangnya permodalan usaha, sumber daya manusia yang terbatas, lemahnya jaringan dan kemampuan penetrasi pasar, iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif, keterbatasan saran dan prasarana, dampak otonomi daerah, dampak pasar bebas, terbatasnya akses pasar (Sakur, 2011). Olehnya melalui pengembangan kapasitas yang dilakukan masyarakat dapat mengembangkan keyakinan untuk berusaha

memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan atas sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun dari luar dengan usaha secara gotong royong. Pelaksanaan pengembangan kapasitas masyarakat yang dilakukan dengan baik akan membawa perubahan dalam peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, keterampilan, tingkah laku dan motivasi (Pustipasasi dkk, 2019).

Puspitasari, dkk. (2019) memberikan penjelasan bahwa pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan organisasi publik untuk menghadapi perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Peningkatan kapasitas tersebut terdiri dari 3 (tiga) sektor yakni sumber daya manusia, penguatan organisasi dan penguatan sistem (*institutional reform*). Penguatan kapasitas masyarakat juga dapat berbasiskan modal sosial, kultural dan ekonomi masyarakat (Kusumawardhan, dkk, 2014) serta juga dipengaruhi oleh kapasitas kinerja dalam hal penggunaan fasilitas yang menunjang kerja, kapasitas pengawasan sebagaimana terlihat pada laporan evaluasi sebagai media monitoring, komitmen bersama yang berkaitan dengan kesepakatan tujuan pelaksanaan kegiatan (Amalia, N. R. 2018).

Melalui pengembangan kapasitas masyarakat dapat diidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan mereka (Chaskin et.al, 2000). Pengembangan kapasitas dari aspek kelembagaan (Abdurohim, 2016) dilakukan mulai dari penggunaan sumber daya (tenaga kerja, fasilitas, sistem/aturan kerja, penganggaran, kewenangan dan struktur organisasi. Sebab dalam kenyataannya bahwa usaha masyarakat menjadi kurang berkembang karena masyarakat selaku pemilik usaha masih memiliki keterbatasan dalam cara berpikir dan bertindak (sikap mental), kurang semangat dan keterbatasan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan usaha. Demikian pula halnya dengan belum jelas dan konsisten informasi, regulasi dari pihak pemerintah. Sebab pengembangan kapasitas secara kelembagaan berusaha bukan hanya sampai masyarakat mampu memproduksi dan mendistribusikan usaha akan tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan hidup, dijadikan sebagai mata pencaharian, serta mendapatkan keuntungan (Abdurohim, 2016).

Dalam kaitannya dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat maka kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan untuk memberikan penguatan modal usaha, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan aksesibilitas, peningkatan kemandirian dalam pengelolaan usaha. Semuanya ini dilakukan agar masyarakat menjadi mampu mengembangkan diri melalui inovasi dan potensi lokal yang berorientasi pada kebutuhan kelompok usaha masyarakat,

produktif, meningkat taraf/kualitas hidup dan tercapai kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan kapasitas maka akan juga terjadi peningkatan kemampuan sikap dan keterampilan, kemampuan mengelola usaha, kemampuan meningkatkan usaha melalui penyediaan modal, melihat peluang pasar. pengembangan kemampuan juga menjadikan masyarakat selaku pelaku usaha mampu bekerja sama (mitra/join usaha) dan mampu beradaptasi (melakukan penyesuaian dengan situasi) serta terlihat adanya peningkatan produksi dan pendapatan (Amina, 2015).

Memperhatikan konsep teori yang dijelaskan diatas maka dapat dimahami bahwa pengembangan kapasitas masyarakat pelaku usaha perlu dikaji melalui aspek sumber daya manusia sebagai pelaku usaha dan secara kelembagaan usaha. Pengkajian dari aspek sumber daya manusia berkaitan dengan dimensi Pengetahuan dan keterampilan serta motivasi. Sementara itu dari aspek kelembagaan usaha berkaitan dengan dimensi modal usaha, jaringan promosi dan pemasaran, peralatan yang digunakan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat menjawab permasalahan penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian melalui pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi melalui wawancara masyarakat selaku pelaku usaha dan pihak pemerintah yang melaksanakan program pengembangan kapasitas masyarakat di daerah penyangga Taman Nasional Bunaken Provinsi Sulawesi Utara. Data yang diperoleh melalui wawancara kepada kedua kelompok informan ini (masyarakat pelaku usaha dan pemerintah) dikategorisasi serta dinarasikan berdasarkan topik kajian agar tidak melebar dan bias. Adapun prosedur pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bertahap yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data, yaitu tahap dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mewawancarai masyarakat pelaku usaha yang ada di wilayah penyangga Taman Nasional Laut Bunaken, Badan Pengelola Taman Nasional Bunaken serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Untuk memperkuat data wawancara maka dilakukan juga pengumpulan data sekunder melalui publikasi ilmiah yang terkait dengan topik penelitian. Peneliti juga melakukan kajian melalui narrative review pada data sekunder yang dikumpulkan termasuk dengan menggunakan sitasi publikasi artikel.

2. Tahap analisis data, yaitu tahap dimana peneliti melakukan pengelompokan data wawancara dan data sekunder yang disesuaikan dengan fokus masalah. setelah data dikelompokkan maka dilanjutkan dengan melakukan pemaknaan analisis pada data dengan membandingkan dengan pokok masalah serta temuan – temuan maupun teori yang terkait dengan objek kajian. Setelah selesai dilakukan pemaknaan dan analisis maka dilanjutkan dengan melakukan penarikan kesimpulan dari setiap fokus masalah.
3. Tahap penyusunan laporan, yaitu tahap dimana peneliti menyusun laporan kegiatan penelitian berdasarkan metode ilmiah secara utuh. Sehingga melalui laporan secara tertulis kajian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi rekomendasi dalam penyelesaian masalah secara praktis. Melalui pendekatan kualitatif dan narrative review ditemukanlah model pengembangan kapasitas masyarakat pengelola usaha sebagaimana temuan penelitian ini.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Taman Nasional Laut Bunaken yang berada di Provinsi Sulawesi Utara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 730/Kpts-II/1991 tanggal 15 Oktober 1991 dengan luas 89.065 ha sebagai daerah kawasan pelestarian alam yang terdiri atas empat wilayah administrative, yaitu Kota Manado, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, dan Kab. Minahasa Selatan. TNL Bunaken meliputi P. Bunaken, P. Manado Tua, P. Mantehage, P. Siladen, P. Nain, pesisir Molas Wori, dan pesisir Arakan – Wawontulap. Daerah Pesisir Utara yaitu Molas, Meras, Tongkeina, Tiwoho. Daerah Pesisir Selatan yaitu Poopoh sampai ke Popareng (ArakanWawontulap). Dalam wilayah ini terdapat 24 desa dengan + 30.000 penduduk yang terdiri dari beragam jenis mata pencarian terdiri dari beragam jenis mata pencarian, budaya dan pola budaya dan pola pemanfaatan sumber daya alam yaitu nelayan nelayan, pengolah pengolah bakau, rumput laut rumput laut, petani (Bagindo. dkk, 2016; <http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/>). Akan tetapi dalam perkembangannya, telah banyak penduduk yang juga melakukan pengelolaan usaha dengan memanfaatkan potensi sumber daya laut seperti pada pengelolaan ikan, pengelolaan usaha rumput laut serta pengelolaan usaha penunjang aktivitas pariwisata.

Taman Nasional Laut Bunaken merupakan kawasan konservasi dan juga merupakan tempat wisata yang menyajikan keindahan ekosistem hutan bakau, padang lamun, terumbu karang, dan ekosistem

daratan/ pesisir (Bagindo. dkk, 2016) sehingga banyak aktivitas masyarakat juga yang mengguluti profesi dalam menunjang sektor pariwisata seperti terlihat dan dapat ditemukan di sekitar objek wisata Taman Nasional Laut Bunaken. Sebagai upaya menjadikan masyarakat ini memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pengelola Balai Taman Nasional Laut Bunaken serta yang dilakukan langsung melalui program desa telah melakukan beberapa program pengembangan kapasitas masyarakat.

Data lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa program pengembangan kapasitas usaha masyarakat di sekitar Taman Nasional Laut Bunaken yaitu :

1. Kegiatan pembelajaran bersama pengelola akses area perikanan kelompok nelayan. Kegiatan ini melibatkan dua kelompok masyarakat yaitu Kelompok Swadaya masyarakat Cahaya Tatapaan dan Kelompok Swadaya Masyarakat Trans
2. Kegiatan Pelatihan penyelaman bagi masyarakat untuk mendapatkan masyarakat penyelam profesional yang menunjang pariwisata desa. Diikuti oleh 6 orang masyarakat dari Desa Popareng dan Desa Poopo.
3. Pembinaan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi baru. Pembinaan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat yang ada di pulau – pulan, pesisir utara dan pesisir selatan Kawasan Taman Nasional Laut Bunaken. Kegiatan ini menemukan bahwa masyarakat kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengembangan ekonomi kreatif, belum optimalnya sinergitas berbagai komponen program pemberdayaan dalam satu program terpadu, minimnya data dan informasi terkait potensi yang dapat dikembangkan.
4. Pembinaan ekonomi kreatif lanjutan dalam rangka implementasi role model pengembangan pemanfaatan zona tradisional untuk ekowisata bersama masyarakat yang diikuti oleh perwakilan dari Kelompok Swadaya Masyarakat Cahaya Tatapaan, Cahaya Trans, Kader Konservasi, Kelompok Perikanan, Kelompok Perempuan Pesisir. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini 60 orang.
5. Pendampingan kelompok masyarakat yang menjadi implementasi role model pengembangan pemanfaatan zona tradisional untuk ekowisata. Kegiatan ini difokuskan pada kelompok swadaya masyarakat yang ada di sekitar kawasan.
6. Pelatihan cara mengolah sampah dan hidroponik untuk peningkatan ekonomi keluarga. Pelatihan

ini diikuti oleh perwakilan dari 25 desa yang ada di sekitar Taman Nasional Laut Bunaken. Setiap desa mengikutsertakan 2 orang peserta.

7. Pendampingan intensi bagi masyarakat di daerah desa yang ditetapkan sebagai desa ekowisata (Desa Popareng Tatapaan, Desa Poopo Tombariri dan Desa Bahoi Likupang) oleh Badan Pengelola Taman Nasional Laut Bunaken.
8. Promosi usaha dan produk untuk hasil usaha masyarakat melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara.
9. Sosialisasi mengenai Izin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA). Kegiatan ini melibatkan 20 pemilik/pengelola resort dan dive center untuk memberikan pemahaman kepada pemilik dan pengelola usaha wisata alam dalam pengelolaan sesuai dengan kebijakan.
10. Pelatihan nelayan berskala kecil. Kegiatan ini untuk memperkuat pengetahuan pengelolaan usaha produksi dan pemasaran hasil usaha. Dalam kegiatan ini juga Pemerintah Provinsi menyalurkan bantuan modal usaha dan peralatan tangkap.

Pemerintah dalam melalui berbagai kebijakan telah melaksanakan berbagai program untuk peningkatan pengembangan usaha masyarakat yang termasuk juga didalamnya bagi masyarakat yang ada di pesisir pantai (Mamentu, 2015). Kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat, memaksimalkan potensi sumber daya lokal, meningkatkan kewirausahaan, serta meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan. Akan tetapi berbagai kebijakan yang telah dilakukan belum memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan (Sakur, 2011; Mamentu, 2015; Abdurohim, 2016).

Perbaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pelaku usaha di daerah penyangga Taman Nasional Laut Bunaken Provinsi Sulawesi Utara dianalisis pengembangan kapasitas masyarakat pelaku usaha berkaitan dengan aspek sumber daya manusia pelaku usaha (Alam & Prawitno, 2015; Yachya dkk, 2016; Pustipasasi dkk, 2019) dan secara kelembagaan usaha (Kusumawardhan, dkk, 2014; Abdurohim, 2016; Sakur, 2011). Pengkajian dari aspek sumber daya manusia berkaitan dengan dimensi Pelatihan untuk pengetahuan dan keterampilan serta pendampingan untuk memotivasi dan mengontrol perkembangan usaha. Sementara itu dari aspek kelembagaan usaha berkaitan dengan dimensi modal usaha, sarana usaha dan manajemen usaha yang digunakan. Penguatan kapasitas pada aspek sumber

daya manusia pelaku usaha maupun secara kelembagaan diharapkan menghasilkan masyarakat pelaku usaha yang mampu memproduksi, memasarkan serta mendapatkan pendapatan/keuntungan dari usaha, mampu bekerja sama (mitra/join usaha) serta mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar yang ada.

Dari data lapangan nyata terlihat bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah telah menunjukkan adanya penguatan kapasitas masyarakat pelaku usaha dalam kaitannya dengan sumber daya manusia dan kelembagaan melalui kegiatan pembelajaran bersama pengelola akses area perikanan kelompok nelayan, kegiatan pelatihan penyelaman bagi, pembinaan ekonomi, pendampingan kelompok masyarakat dan desa ekowisata, pelatihan cara mengolah sampah dan hidroponik untuk peningkatan ekonomi keluarga, promosi usaha dan produk, sosialisasi kebijakan dan pelatihan nelayan berskala kecil. akan tetapi kegiatan kegiatan tersebut belum secara spesifik mampu menjadikan masyarakat pelaku usaha memiliki kemampuan. Sebab kegiatan pelatihan yang dilakukan lebih kepada memberikan pengenalan tentang proses pengelolaan usaha secara umum. Upaya untuk menjadikan masyarakat kreatif dalam mengelola usaha pun tidak secara spesifik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat di daerah penyangga Taman Nasional Laut Bunaken. Perlunya pengembangan ekonomi produktif sesuai potensi dan sumber daya lokal karena sampai dengan saat ini terlihat bahwa masih lemahnya pendidikan, keterampilan, kemampuan manajerial serta komitmen masyarakat dalam mengelola usaha. (Khaidarmansyah dan Saifuddin, 2019).

Terdapat tiga desa yang telah ditetapkan sebagai desa ekowisata pun belum menunjukkan hasil yang baik sebagaimana yang diharapkan. Konsep ekowisata bukan hanya menghadirkan pengelolaan wisata yang menjaga kelestarian lingkungan akan tetapi juga mampu membangkitkan perekonomian lokal masyarakat. Hal ini belum terjadi di masyarakat Desa Popareng, masyarakat Desa Poopo maupun pada masyarakat Desa Bahoi. Upaya untuk memberikan keuntungan secara finansial bagi masyarakat di ketiga desa ekowisata ini belum terlihat sebagaimana dilakukannya observasi lapangan.

Berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat untuk kelompok masyarakat yang ada di daerah penyangga kawasan Taman Nasional Laut Bunaken menjadi penting ketika kelompok masyarakat mengerti dengan baik dan benar lingkup ekonomi kreatif. Menumbuhkan reaktivitas masyarakat memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang peluang pasar dan penggunaan teknologi terbaru. Kondisi masyarakat yang ada di di daerah

penyangga kawasan Taman Nasional Laut Bunaken sebagian besar merupakan masyarakat nelayan tradisional. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok swadaya seperti Cahaya Tatapaan dan Cahaya Trans dalam aktivitas dan pengelolaan usaha belum memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif. Usaha yang dilakukan seperti produksi dan penjualan ikan kering melalui proses pengasapan masih dilakukan secara tradisional demikian pula halnya dengan pemasaran. Masyarakat belum mampu menggunakan teknologi baru dalam produksi dan pemasaran.

Pola pengelolaan usaha oleh masyarakat yang diharapkan pemerintah yang *pro poor, pro growth, pro job*, dan *pro environment* sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat serta diikuti dengan adanya penguatan nilai sosial, nilai budaya tidak dapat tercapai ketika model pengembangan kapasitas hanya dilakukan seperti saat ini. Kegiatan pelatihan untuk penguatan kapasitas masyarakat yang dilakukan selama ini dapat dinilai hanyalah sebagai bentuk pelaksanaan program semata. Upaya untuk memberikan dorongan kepada masyarakat selaku pelaku usaha belum dirasakan oleh masyarakat di daerah penyangga kawasan Taman Nasional Laut Bunaken. Pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat dalam rangka implementasi role model pengembangan pemanfaatan zona tradisional untuk ekowisata serta pendampingan intensi pada desa ekowisata (Desa Popareng Tatapaan, Desa Poopo Tombariri dan Desa Bahoi Likupang) oleh Badan Pengelola Taman Nasional Laut Bunaken lebih diarahkan pada upaya pelestarian alam bukan untuk penguatan kemampuan mengelola usaha. Hal ini tidak sejalan dengan keberadaan Taman Nasional Laut Bunaken sebagai Kawasan Pelestarian Alam yang merupakan barometer wisata di Sulawesi Utara serta sebagai penggerak ekonomi kreatif sebagai dampak dari aktivitas wisata.

Upaya menciptakan dan menghadirkan kemampuan usaha masyarakat hanya terlihat pada pelatihan hidroponik ini untuk peningkatan ekonomi keluarga. Pelatihan hidroponik memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi baru. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah daerah penyangga kawasan Taman Nasional Laut Bunaken dalam upaya memenuhi kebutuhan seperti sayur dan rempah rempah yang saat ini masih didistribusi secara pemasarannya dari daerah Minahasa. Hidroponik akan menjadi solusi bagi masyarakat dalam pemanfaatan lahan terbatas dan daerah dengan kondisi salinitas tinggi. Pelatihan hidroponik memotivasi masyarakat

untuk memanfaatkan tanah marginal di pekarangan dan lahan sempit sebagai penyediaan sayuran kebutuhan rumah tangga.

Pengembangan kapasitas bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan karena pengembangan kapasitas merupakan upaya memperkuat kemampuan individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga serta merupakan proses kreatif dalam membangun kapasitas yang belum Nampak (Ratnasari, dkk. 2013).

Berkaitan dengan penguatan secara kelembagaan atau organisasi maka diperlukannya modal usaha, sarana usaha dan manajemen usaha yang baik. Berbagai kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana data lapangan menunjukkan pada upaya untuk membantu masyarakat sebagai pelaku usaha dalam ketersediaan modal yang sampai saat ini masih merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat pelaku usaha di daerah penyangga kawasan Taman Nasional Laut Bunaken. Tidak berkembangnya usaha dan berakibat pada berhentinya pengelolaan usaha bukan semata karena bahan untuk produksi atau tidak mampu memasarkan. Akan tetapi masyarakat masih diperhadapkan dengan keterbatasan modal sehingga keuntungan maupun modal usaha terkadang digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari – hari.

Pengembangan kapasitas yang merupakan upaya meningkatkan kemampuan individu, kelompok maupun organisasi dalam mengendalikan masalah (Setiasih, dkk. 2017) belum terjadi pada masyarakat pelaku usaha di daerah penyangga kawasan Taman Nasional Laut Bunaken. Pengembangan kapasitas yang juga merupakan proses pertumbuhan dan pengembangan yang haruslah berorientasi pada hasil (Suitela.J.J, 2017) memerlukan kemampuan dari pelaku usaha untuk menggunakan sarana yang baik serta dikelola secara profesional. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dan modal menjadi penting dalam pengembangan usaha (Susanto dan Firmansyah, 2014). Penggunaan sarana usaha yang masih sederhana serta pengelolaan usaha yang dilakukan secara tradisional sebagaimana terlihat pada masyarakat pelaku usaha di daerah penyangga kawasan Taman Nasional Laut Bunaken perlu diselesaikan. Dampak atau hasil dari pengembangan kapasitas pengelolaan usaha melalui adanya motivasi dalam mengelola usaha meningkat, kepemimpinan

berjalan efektif, administrasi keuangan berjalan tertib, administrasi kelompok teratur, dan adanya transparansi keuangan (Suitela, 2017) menjadi harapan dan kerinduan masyarakat pelaku usaha. Demikian pula halnya dengan peningkatan kapasitas berkaitan dengan peningkatan kemampuan sikap dan keterampilan, kemampuan manajerial usaha (perencanaan sampai dengan evaluasi), kemampuan meningkatkan usaha (penyediaan modal, melihat peluang pasar, kemampuan bekerja sama (mitra/join usaha) dan kemampuan beradaptasi (melakukan penyesuaian dengan situasi). Yang terlihat pada peningkatan produksi dan pendapatan (Amina, 2015).

Penguatan kapasitas yang secara keseluruhan diharapkan menghasilkan masyarakat selaku pelaku usaha yang produktif dan dapat menunjang perekonomian daerah/nasional masih perlu untuk di perbaiki kembali. Pengembangan usaha dapat dilakukan oleh masyarakat secara pribadi atau melalui model kemitraan/kerjasama ketika ada penguatan kemampuan dalam hal pengetahuan pengelolaan usaha. Pengelolaan usaha yang juga memberikan prospek pada pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat ketika usahanya dikelola dengan baik serta tersedia modal yang cukup untuk pembiayaan jalannya usaha. Usaha masyarakat akan juga berjalan dan mampu bertahan sekalipun diperhadapkan dengan persaingan usaha keitika terjadi peningkatan pengelolaan kualitas produk, peningkatan kualitas dan kuantitas promosi. Pola pembangunan usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan program pemerintah saat ini mendorong pengembangan potensi yang diarahkan pada aktivitas perekonomian yang aman, nyaman dan mudah (Ismail. M. 2020).

## SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebagaimana data lapangan dan konsep teori yang ada, maka dapat dikemukakan bahwa pengembangan kapasitas masyarakat pelaku usaha di daerah penyangga Taman Nasional Laut Bunaken Provinsi Sulawesi Utara lebih dilakukan pada pelaksanaan program melalui kegiatan pelatihan untuk penguatan pengetahuan dan keterampilan. Penguatan kapasitas belum mampu memberikan motivasi dan pendampingan yang tepat bagi pelaku usaha. Kebutuhan akan modal usaha, penggunaan teknologi baru serta manajemen usaha yang menjadi kebutuhan masyarakat pelaku usaha saat ini belum terpenuhi. Akibatnya upaya untuk menjadikan masyarakat pelaku usaha mampu memproduksi dan memasarkan produk, upaya untuk meningkat pendapatan, upaya untuk adanya mitra usaha serta kemampuan dalam

beradaptasi dengan perkembangan pasar belum terjadi pada masyarakat pelaku usaha di daerah penyangga Taman Nasional Laut Bunaken Provinsi Sulawesi Utara. Olehnya diperlukan penataan kembali model pengembangan kapasitas dengan memperhatikan permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pelaku usaha seperti ketersediaan modal, sarana dan pengetahuan manajemen usaha modern. Konsep yang dapat dikemukakan sebagai temuan penelitian ini bahwa pengembangan kapasitas masyarakat pelaku usaha dilakukan pada penguatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan. Penguatan kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha berbentuk pelatihan untuk pengetahuan dan keterampilan, serta pendampingan untuk memotivasi dan mengontrol perkembangan usaha. Pengembangan kapasitas kelembagaan usaha berbentuk penguatan modal usaha, sarana usaha dan manajemen usaha yang digunakan. Penguatan kapasitas pada aspek sumber daya manusia pelaku usaha maupun secara kelembagaan yang dilakukan secara baik menghasilkan masyarakat pelaku usaha yang mampu memproduksi, memasarkan serta mendapatkan pendapatan/keuntungan dari usaha, mampu bekerja sama (mitra/join usaha) serta mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar yang ada.

## REFERENSI

- Abduruohim. B.S.D, 2016. *Kapasitas Kelembagaan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Usaha Koneksi di Wilayah Sentra Cigondeweh Bandung)*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Inovasi Ipteks Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) UNMAS Denpasar Bali 29 – 30 Agustus 2016. (987-999).
- Alam. A. S dan Prawitno. A. 2015. Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. Government: *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 8, No 2 Juli 2015 (93-104)*.
- Amalia, N. R. 2018 *Pengembangan Kapasitas Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi Jarak – Oleh Pemerintah Kota Surabaya*. <http://repository.unair.ac.id/74647>.
- Amina. S. 2015. Pengembangan Kapasitas Petani Kecil Lahan Kering Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan. *Jurnal Bina Praja Vol 7 No, 3 Edisi September 2015. (197-120)*.
- Bagindo. M, Sanim. B dan Saptono. I. T, 2016. Model Bisnis Ekowisata di Taman Nasional Laut Bunaken dengan Pendekatan Business Model Canvas. *Jurnal Manajemen IKM. Vo. 11 No. 1. (80-88)*.
- Chaskin, R. J, Brown. P dan Vidal. S.V.S. 2000. *Building Community Capacity, Aldine de Gruyter*, New York: Walter De Gruyter, Inc.
- Gunawan. A.S, Hamid. D dan Endang. N.P. M. G. W, 2016. Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. (Studi pada Wisata Religi Gereja Puhsarang Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 32 No. 1 Maret 2016. (1-8)*
- Ismail. M. 2020. Strategi pengembangan Pariwisata Provinsi Papua. Matra pembaruan; *Jurnal Inovasi Kebijakan. Vol 4 No. 1. 2020 (59-69)* <http://jurnal.kemendagri.go.id/>
- Khaidarmansyah dan Saifuddin. R, 2019. Penguatan Lembaga Ekonomi Desa Dalam Mendorong Pariwisata di Daerah. *Jurnal Kajian Pariwisata Vol 1 No. 1 September 2019. (63-75)*.
- Kusumawardhani, D. T. P, Tahajuddin. U, dan Wardiat.D, 2014. *Model Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam di Indonesia*. Prosiding Pemaparan Hasil Penelitian Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Tahun 2014, Peran Penelitian Geoteknologi untuk Menunjang Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Hal 21-36.
- Mamentu. M. 2015. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Kota Manado (Studi Terhadap Pelaksanaan Program Usaha Mina Pedesaan Nelayan Tangkap oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. Vol 2 No.2 Tahun 2015 (53-59)*.
- Puspitasari. D.C, Satriani. R, Pmungkas. S.B 2019. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Partisipatif: Studi Implementasi Saemaul Undong di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanitis. Vol 4 No. 1 Juli 2019. Hal 1-13*.
- Ratnasari. J. D, Makmur. M dan Ribawanto. H, 2013, Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3, (103-110)*.

- Sakur, 2011. Kajian Faktor – Faktor Yang Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah : Studi Kasus di Kota Surakarta. *Jurnal Spirit Publik Vo. 7 No. 2 (85-110)*.
- Setiasih. I. S, Santoso. M. B, Hanidah I dan Marta. H, 2017. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Dalam Menggunakan Hanjeli Sebagai Alternatif Pengganti Beras Sebagai Pangan Pokok dan Produk Olahan. *Jurnal Penelitian & PKM. Vol 4 No 2. Juli 2017 (147-152)*.
- Suitela. J. J. 2017. Pendampingan Sosial Dalam Pengembangan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama di Bandung. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol.16 No.1, Juni 2017 (134-162)*.
- Sunaryo. B, 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Susanto. A dan Firmansyah. 2014. Kajian Kelayakan pengembangan Usaha Pariwisata Alam di Kawasan Wanawisata Ngrape Kabupaten Madiun. *Jurnal Agri-Tek Vol. 15 No 2 September 2014. (59-66)*.
- Yachya. A. N. Wilopo dan Mawardi. M. K, 2016. Pengelolaan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis CBT (Community Based Tourism) (Studi pada Kawasan Wisata Pantai Clungup Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 39, No. 2 Oktober 2016. Hal 107-116*.